



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI MALANG
SUB UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI MALANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **IBRAHIM BAFADAL**
2. Jabatan : **WAKIL REKTOR IV BIDANG PERENCANAAN, SISTEM INFORMASI,
KOMUNIKASI DAN KERJA SAMA**
3. NHK : **210298**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.830.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m²/170 m² di MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 470.000.000
2. Tanah Seluas 414 m² di MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
3. Tanah Seluas 200 m² di MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 142 m²/320 m² di KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m²/102 m² di KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m²/102 m² di KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 239.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA VEGA ZR SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, YAMAHA JUPITER Z SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOBIL, HONDA JAZZ GK5 5.1 RS CVT (CKD) Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000



4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI

Rp. 9.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 50.758.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 618.158.707

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 4.737.916.707

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.737.916.707

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **14 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.